

ABSTRAK

MANAJEMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG

Oleh

AFIF ALQODAR

Tingginya praktik politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, yang tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan politik uang tertinggi kedua. Meskipun sudah ada berbagai peraturan dan upaya untuk menanggulangi praktik ini, politik uang tetap menjadi masalah besar yang menghambat terciptanya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam mencegah praktik politik uang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh Hanafi (2015), dimana terdapat indikator perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam mencegah praktik politik uang telah berjalan secara efektif dan terstruktur. Hal ini tercermin dari perencanaan yang sistematis, pembagian tugas yang jelas, pengarahan yang konsisten melalui pelatihan dan evaluasi, serta pengendalian yang komprehensif dengan melibatkan teknologi dan partisipasi masyarakat. Seluruh langkah ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjaga integritas pemilu dan menciptakan proses demokrasi yang bersih, adil, dan transparan, meskipun masih diperlukan penguatan dalam optimalisasi teknologi dan pelibatan publik secara lebih luas.

Kata kunci: manajemen, politik uang, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

MANAGEMENT OF THE LAMPUNG PROVINCIAL ELECTION COMMISSION IN PREVENTING MONEY POLITICS

By

AFIF ALQODAR

The widespread practice of money politics in Indonesian elections, especially in Lampung Province, has been recorded as the province with the second-highest level of vulnerability to money politics. Despite various regulations and efforts to tackle this issue, money politics remains a major problem that hinders the creation of leaders with quality and integrity. This study aims to examine how the Provincial General Election Commission (KPU) of Lampung manages the prevention of money politics.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques employed in the research include interviews, observations, and documentation. This research utilizes the management theory proposed by Hanafi (2015), which includes indicators of planning, organizing, directing, and controlling.

Based on the findings, it can be concluded that the management of the KPU of Lampung Province to prevent money politics have been carried out effectively and in a structured manner. This is evident in their systematic planning, clear division of responsibilities, consistent direction through training and evaluation, and comprehensive control measures involving technology and public participation. These efforts reflect the KPU's strong commitment to maintaining the integrity of elections and ensuring a fair, transparent, and democratic electoral process, although further improvements are still needed in optimizing technology and broadening public engagement.

Keywords: management, money politics, Election Commission